PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Daerah

Oleh:

BISRI MUSTOFA

20610020

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2021

PENGESAHAN

TESIS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

disusun oleh :

BISRI MUSTOFA

20610020

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal : 6 Agustus 2021

Susunan Tim Penguji

Pembimbing/Penguji I
Dr. E.W. Tri Nugroho _____

Penguji II
Dr. R. Widodo Triputro _____

Penguji III
Dr. Supardal _____

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Mengetahui
Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bisri Mustofa

Nomor Mahasiswa : 20610020

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Bisri Mustofa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas selesainya penulisan tesis ini. Tesis ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kajian tesis ini berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta.

Salah satu hal yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui KUBE adalah ingin memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE.

Tesis ini terwujud atas bantuan, dorongan, dan bimbingan dari banyak pihak, baik yang terlibat secara kelembagaan maupun perorangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. E.W. Tri Nugroho, selaku Pembimbing/Penguji I, yang telah banyak membantu, bukan saja melalui bimbingan rutin, melainkan juga dorongan motivasi dan bimbingan penelitian lapangan, sebagai akademisi yang banyak pengalaman tentang pemberdayaan masyarakat.
3. Dr. R. Widodo Triputro, selaku Penguji II, yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan tulisan ini.
4. Dr. Supardal, selaku Penguji III, yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berharga.
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. Yohanes Irianta, M.Si, yang telah memberikan ijin dan kemudahan-kemudahan dalam penelitian.

6. Lurah Kalurahan Gulurejo, yang telah memberikan ijin dan informasi tentang obyek penelitian.

Demikian pula kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan secara administratif dan teknis yang tidak bisa diabaikan peranannya, yaitu: Drs. Abdul Kahar, M.Si, Ika Dwi Kusumastuti, S.IP, Triyuni Lestari, A.Md, Ferniati,S.Sos, yang telah membantu dengan sabar berbagai kebutuhan informasi.

Untuk segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, khususnya angkatan 25 yang telah menjalin hubungan yang erat penuh kekeluargaan selama ini, dan semoga dapat berlanjut seterusnya.

Semoga bantuan, bimbingan dan pengorbanan dari semua pihak kepada penulis mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah *subhanahu wata'ala*. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Penulis

Bisri Mustofa

NIM: 20610020

MOTTO

Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (QS. Al-Hasyr ayat 22)

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh samudera lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. Luqman ayat 27)

Sabar Subur, Sareh Pikoleh. Sing sapa tekun bakal tekan

Siapa Sabar bakal subur, Siapa sabar bakal dapat. Siapa tekun bakal sampai

(Kawicaksanan Jawi)

Man jadda wajada

Siapa giat pasti dapat (Pepatah Arab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini aku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat aku hormati dan sayangi, almarhum Ayahanda H. Moch. Djaelani dan almarhumah Ibunda Hj. Masfu'ah, terima kasih atas semua doa, kasih sayang, bimbingan, dan motivasinya. Paripurna sudah tugas yang engkau emban dalam mendidik, membesarkan, dan mengantarkan putramu ke gerbang keberhasilan. Teriring doa: *allahumagfir lahuma warkhamhuma waafihima wakfuanhuma waakrim nuzulahuma wawasikmadholahuma wagsilhuma bilmai wassalji walbarod wanakihima minal khotoya kama yunaqossaubul abyadu minaddanas…. Fainnahu laa yagfiruddunuuba illa anta. Innahu huwal ghofururrokhiim.* Ya Allah ampuni kesalahan ayah dan ibu, kasihi dan sayangi, maafkan mereka berdua, muliakan tempat tinggalnya, lapangkan jalan masuknya, cucilah dengan air jernih, air es, air embun, bersihkan dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kekotoran…. Maka sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aamiin
2. Istriku tercinta Umi Kuntari, SS dan anak-anakku yang kusayangi: Narasresta Ndaru Nurseta dan Habibi Habiburrahman, atas dukungannya memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan menciptakan suasana kondusif yang menggembirakan.

INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tema ini menjadi penting untuk diteliti karena adanya permasalahan sosial berupa kemiskinan. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, diperlukan upaya penanggulangannya, diantaranya pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE. Pemda Kulon Progo bersama beberapa kementerian bersinergi untuk menanggulangi kemiskinan melalui program KUBE. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah penelitian ini bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian yang diteliti yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*, dengan sembilan informan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data memakai model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap perlindungan. Tahap penyadaran dilakukan melalui sosialisasi program dan bimbingan pendamping. Tahap peningkatan kapasitas dilakukan secara individu dan kelembagaan melalui pelatihan membatik dan mewarnai, pelatihan menjahit, pelatihan pemasaran *online,* pendampingan KUBE, bantuan penumbuhan, bantuan pengembangan, serta bantuan kredit permodalan. Sedangkan tahap perlindungan dilakukan dengan pemberian bantuan sosial melalui program BPNT/Sembako, PKH, bantuan kesehatan, serta bantuan pendidikan. Kendala-kendala yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat pada KUBE Gulurejo. Kendala pada tahap penyadaran berupa sosialisasi program belum bisa diterima anggota kelompok, munculnya konflik internal, data kemiskinan mengandung *error* dan adanya ”permainan” aparatur dalam menentukan hasil musyawarah kalurahan. Kendala pada tahap peningkatan kapasitas, yakni: masalah teknis pelaksanaan BPNT/Sembako dan pengelolaan E-Warong, kesulitan membuat pola dan meracik warna oleh anggota-anggota kelompok pada pelatihan membatik, anggota KUBE gagap teknologi pada pelatihan pemasaran *online*. Adapun kendala pada tahap perlindungan sosial adalah adanya kecemburuan warga kepada anggota-anggota KUBE yang mendapat bantuan, dan kepesertaan KIS dipergunakan oleh orang lain, serta adanya indikasi ketergantungan KUBE Gulurejo pada program pemerintah.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

ABSTRACT

This study examines the empowerment of the poor through the Joint Business Group (KUBE:Kelompok Usaha Bersama). This theme is important to study because of the social problems in the form of poverty. In order to tackle the problem of poverty, efforts are needed to overcome it, including empowering the poor through KUBE. The Kulon Progo Regional Government together with several ministries work together to reduce poverty through the KUBE program. Therefore, the researcher formulates the problem of this research is how to empower the poor through KUBE in Kulon Progo

This research is a descriptive-qualitative research with the type of study is a case study. The research location is in Gulurejo Village, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Special Region of Yogyakarta. The object of this research is the empowerment of the poor through KUBE. The informant selection technique used is a purposive technique, with nine informants. Data collection technique is observation, in-depth interviews, and documentation. And data analysis technique is an interactive analysis model.

The results showed that the empowerment of the poor through KUBE in Gulurejo was carried out in three stages, namely: the awareness stage, the capacity development stage, and the protection stage. The awareness stage is carried out through program socialization and mentoring. The capacity development stage is carried out individually and institutionally through batik and coloring training, sewing training, online marketing training, KUBE assistance, growth assistance, development assistance, and capital credit assistance. And the protection phase is carried out by providing social assistance through the BPNT/Sembako program, PKH, health assistance, and education assistance. Obstacles that arise in community empowerment at KUBE Gulurejo, namely; Constraints at the awareness stage in the form of program socialization have not been accepted by group members, the emergence of internal conflicts, poverty data containing errors and the existence of "games or manipulation" by the village officers in determining the results of village deliberations (Musyawarah Kalurahan). Constraints at the capacity building stage, namely: technical problems in implementing BPNT/Sembako and managing E-Warong, difficulties in making patterns and mixing colors by group members in batik training, KUBE members are technology savvy in online marketing training. The obstacles at the social protection stage are the jealousy of the citizens towards KUBE members who receive assistance, and KIS membership which is used by other people, and there is an indication of KUBE Gulurejo's dependence on government program.

Keywords: Community Empowerment, Joint Business Group (Kelompok Usaha Bersama, KUBE).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat kompleks dan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemda DIY telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan melalui pembangunan (*development)* untuk mencapai kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, jumlah penduduk miskin masih terus ada, bahkan jumlah penduduk miskin cenderung bertambah di tengah wabah pandemi *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di DIY tahun 2020 mencapai 12,28 persen atau sebanyak 475,072 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 454.625/kapita/bulan.

Tabel I.1.

Penduduk Miskin di Kabupaten-Kota Se DIY Tahun 2019 - 2020

Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa**		**Persentase**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**
Kulon Progo	74,62	78,06	17,39	18,01
Gunung Kidul	123,08	127,61	16,61	17,07
Bantul	131,15	138,66	12,92	13,50
Sleman	90,17	99,78	7,41	8,12
Kota Yogyakarta	29,45	31,62	6,84	7,27

(Sumber https://bps.go.id. Diunduh pada tanggal 16 Maret 2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo menampati urutan pertama sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan terbanyak di DIY, yakni 17,39% pada tahun 2019 dan 18, 01% pada tahun 2020 masing-masing dengan jumlah 74,62 ribu jiwa (tahun 2019) dan sebanyak 78,06 ribu jiwa (tahun 2020). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul dengan angka kemiskinan sebesar 16,61 pada tahun 2019 dan 17,07% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 123,08 ribu jiwa (tahun 2019) dan 127,61 ribu jiwa (tahun 2020). Selanjutnya disusul Kabupaten Bantul dengan angka kemiskinan sebesar 12,92% tahun 2019 dan 13,50% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 131,15 ribu jiwa (tahun 2019) dan 138,66 ribu jiwa (tahun 2020). Sementara itu, Kotamadya Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang paling kecil di antara kabupaten-kabupaten lain di DIY dengan jumlah 6,84% pada tahun 2019 dan 7,27% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 29,45 ribu jiwa (tahun 2019) dan 31,62 ribu jiwa (tahun 2020).

Besarnya angka kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pemda Kulon Progo. Pemda Kulon Progo telah melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Batuan Beras Rakyat Miskin (Raskin) atau Beras Rakyat Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima

Bantuan Iuran (JKN PBI), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Perbaikan Sarana Lingkungan (Sarling), Program Beasiswa, Listrik Bersubsidi, Pengembangan Desa-desa Wisata, Pembentukan Kawasan Industri, Bantuan Sosial Covid-19 dan lain sebagainya. Namun, kemiskinan seakan sulit untuk diatasi dan penduduk miskin tetap terpuruk taraf kehidupannya.

Menurut Soetomo (2018), seringkali pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih mengandung beberapa kelemahan dan permasalahan yaitu:

Pertama, pemerintah melihat penyebab kemiskinan cenderung dari segi ekonomi semata yaitu dari segi pendapatan perkapita. Jika seseorang berpendapatan rendah, maka ia termasuk kelompok orang yang tidak mampu, tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya.

Kedua, seringkali program yang diberikan hanya untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada tataran gejala *(symtom-symtom*) yang tampak dari luar, penanganan yang dilakukan tidak menjangkau persoalan dasar yaitu penyebab kemiskinan itu sendiri.

Ketiga, program penanggulangan kemiskinan didesain pemerintah secara seragam bagi seluruh daerah di Indonesia, sehingga tidak mengakomodasi kepentingan lokal yang beragam, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Keempat, penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan antar kebijakan dan program yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan maupun program yang dilaksanakan harus berpihak dan memberdayakan masyarakat sehingga tidak

menempatkan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan, namun menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Kelima, program yang bersifat *top down* juga mempunyai kelemahan lain yang sering ditemui dalam pelaksanaannya seperti salah sasaran, adanya kepentingan pejabat, serta ketergantungan masyarakat miskin kepada bantuan yang diberikan. Selain itu berkurangnya nilai-nilai luhur budaya seperti sifat gotong-royong, rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian dan kebersamaan, maupun nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat (Soetomo, 2018).

Meskipun demikian pemerintah terus melakukan upaya pembenahan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat regulasi berupa kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat miskin (*pro poor policy*). Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang dan kewenangan kepada masyarakat sampai pada level komunitas terbawah dalam pengelolaan pembangunan termasuk juga proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang memberdayakan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 tahun 2015 pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan Penanggulangan Kemiskinan adalah: a) Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap, b) Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah, c) Tercapainya penurunan jumlah pengangguran, d) Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

antar Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan, e) Terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Mengenai upaya-upaya menanggulangi kemiskinan tersebut, Pemda Kabupaten Kulon Progo menaruh perhatian yang sangat besar. Kelima tujuan penanganan kemiskinan dalam Perda tersebut dapat direalisasikan oleh PD-PD yang berkompeten, dengan penanganan secara lintas sektoral melalui PD-PD terkait misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain sebagainya .

Meskipun demikian, dari observasi awal, peneliti mendapat informasi bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain:

Pertama, terbatasnya anggaran Pemda Kulon Progo untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Kedua, terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki Pemda Kulon Progo untuk dapat didayagunakan dalam program/kegiatan.

Ketiga, belum cukup tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan dalam program/kegiatan.

Keempat, belum optimalnya sinergi dengan pihak-pihak (*stakeholders*) terkait sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Kelima, belum adanya *road map* penanggulangan kemiskinan yang dapat memetakan penanganan penanggulangan kemiskinan secara holistik.

Sejalan dengan kebijakan Pemda Kabupaten Kulon Progo tentang Penanggulangan Kemiskinan, program KUBE digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi dan sosial. Program KUBE dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan kelompok masyarakat tidak mampu. Melalui Program KUBE ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin KUBE diarahkan pada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui: a) peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin secara bersama dalam kelompok, b) peningkatan pendapatan, c) pengembangan usaha, d) pemberdayaan mayarakat miskin. (Petunjuk Teknis KUBE, Kemensos RI, 2020)

Melalui program KUBE, masyarakat diberikan bantuan dana sebagai modal untuk membentuk usaha ekonomi produktif. KUBE beranggotakan warga tidak mampu yang bergabung dalam kelompok untuk melaksanakan ekonomi produktif. Program KUBE partisipasi dan peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, sehingga masyarakat miskin tidak semata-mata menjadi obyek program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat miskin secara sadar membentuk kelompok usaha

bersama, menentukan dan menyepakati sendiri bentuk kegiatan yang akan mereka laksanakan serta menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang mereka miliki.

Sejak pertama ditumbuhkan pada tahun 2010, KUBE di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 525 kelompok (Sumber: Data Base KUBE Dinas Sosial Kulon Progo tahun 2021). Melalui KUBE Pemda Kulon Progo berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya KUBE-KUBE Kabupaten Kulon Progo mengalami berbagai macam permasalahan. Hasil dari beberapa kajian tentang KUBE menyatakan bahwa mulai dari ditumbuhkan, terdapat KUBE mengalami kematian, KUBE yang tidak berkembang, serta terdapat pula KUBE berhasil. Umumnya permasalahan yang dihadapi oleh KUBE meliputi: kurangnya modal kerja, tidak berfungsinya kepengurusan KUBE, kurang kompaknya anggota KUBE, kurangnya dukungan dari pemerintah, tidak memiliki jaringan kerja yang luas (kemitraan), serta rendahnya penggunaan teknologi. Sedangkan potensi yang dimiliki KUBE seperti bahan baku melimpah, adanya keterampilan dari anggota, tingginya partisipasi anggota, adanya peluang pasar, adanya lembaga keuangan (perbankan), adanya instansi/pemerintah, adanya LSM pemerhati kemiskinan. (Sumber: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10495. Diunduh pada tanggal 16 Maret 2021).

Melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo, Pemda telah membuka peluang bagi KUBE untuk berkembang. Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan suatu ”ideology” yang menggerakkan dan mensinergikan semua potensi yang ada di

Kabupaten Kulon Progo untuk didayagunakan bagi kepentingan masyarakat Kulon Progo. Dukungan Pemda Kulon Progo kepada KUBE diwujudkan dalam bentuk pelibatan KUBE pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako. Pada Program BPNT/Sembako tersebut, KUBE ditunjuk sebagai E-Warong, Elektronik Warung Gotong Royong. E-Warong ini merupakan agen BNI 46 sebagai tempat transaksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program BPNT/Sembako.

Gerakan Bela Beli Kulon Progo yang telah dideklarasikan dari segi pertanian dan pangan merupakan tekad bersama antara pemerintah, masyarakat Kulon Progo dan pemangku kepentingan dengan slogan "Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe," "Bisa Gawe Ngapa Tuku", "Bisa Nandur Ngapa Tuku,". Program BPNT/Sembako yang digulirkan ditangkap oleh Pemda Kulon Progo sebagai peluang, uang yang beredar dari program tersebut sekitar 10,2 milyar rupiah per bulannya dapat manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi *stakeholders* yang terlibat dalam Program BPNT/Sembako seperti petani, pengerajin, peternak, pembudidaya, juga para supliyer, E-Warong KUBE, serta KPM itu sendiri.

Menurut Data E-Warong Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo tahun 2021, terdapat sebanyak 113 KUBE/kelompok E-Warong yang menjadi tempat transaksi BPNT/Sembako sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (agen BNI 46) dan sebanyak 23 KUBE E-Warong sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo (Agen BPD DIY dan BPD Jateng), yang tersebar pada 12 kapanewon di Kulon

Progo. Di antara KUBE E-Warong tersebut adalah KUBE yang terdapat di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian tentang KUBE ini memilih KUBE Gulurejo sebagai lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan-pertimbangan: *Pertama*, KUBE Gulurejo merupakan KUBE berprestasi. KUBE Mendiro Gulurejo menjadi KUBE Terbaik ke-1 Tingkat DIY pada tahun 2018. KUBE Mendiro Gulurejo menjadi finalis peringkat ke-5 pada Lomba KUBE Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2018 mewakili DIY di Jakarta. *Kedua*, terdapat usaha pemberdayaan masyarakat miskin pada KUBE Gulurejo. *Ketiga*, adanya sinergi antar PD dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Semenjak awal ditumbuhkan pada tahun 2016, KUBE Gulurejo memiliki usaha di bidang produksi batik. Semula produksi batik hanya untuk memenuhi permintaan konsumen lokal, namun saat ini telah menjual produk untuk mencukupi permintaan masyarakat di luar kota. Pada awal penumbuhan, KUBE mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 20 juta rupiah per kelompok yang dipergunakan sebagai modal usaha. Serta mendapatkan bantuan kembali untuk pengembangan KUBE sebesar 20 juta rupiah pada tahun 2019.

Sebagai KUBE E-Warong, KUBE Gulurejo selain memproduksi batik dan menjualnya, juga menjadi agen BNI 46 dalam Program BPNT/Sembako. Peran sebagai E-Warong, KUBE ini adalah menjadi tempat transaksi dengan KPM di wilayah Gulurejo yang melayani sekitar 750-800 KPM setiap bulannya, dengan menjual komoditas BPNT/Sembako yang diperoleh dari para suplier seperti beras,

telor dan daging ayam, ikan laut, ikan air tawar, kacang tanah, kacang hijau, tahu, tempe, sayuran dan buah-buahan.

Gambar I.1
Pelaksanaan Program BPNT dan Keterlibatan KUBE
di Kabupaten Kulon Progo

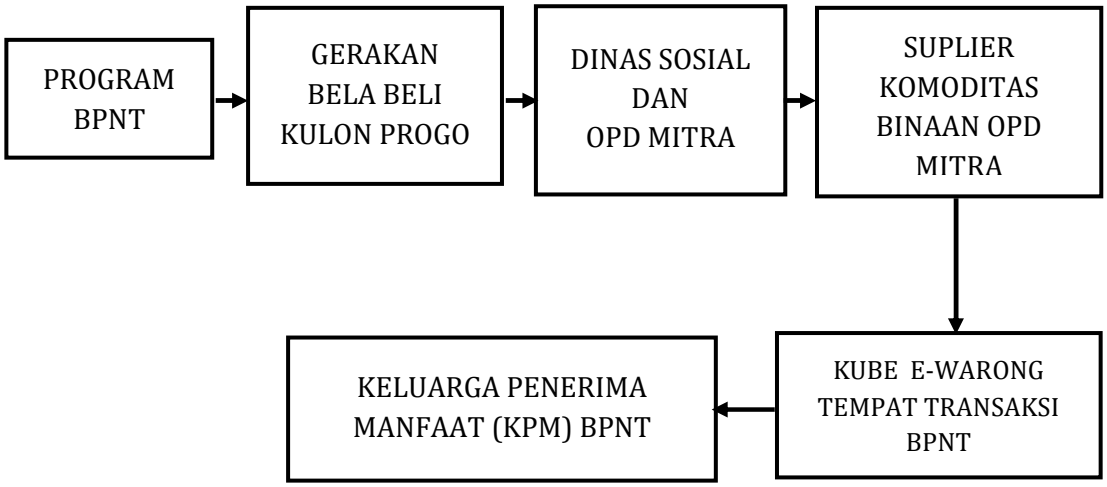

(Sumber: Diolah dari berbagai bahan)

Sampai saat ini, KUBE Gulurejo masih tetap utuh dan kompak sebagai kelompok. KUBE Gulurejo memiliki usaha ganda sebagai selain KUBE E-Warong juga KUBE Batik yang secara rutin melakukan pertemuan sebulan sekali sebagai wahana komunikasi dan menuangkan ide/gagasan/masalah yang dialami kelompok. Pertemuan dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Para anggota KUBE juga rutin membayar Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) yang berfungsi sebagai iuran sosial guna membantu anggota yang sakit atau membutuhkan.

Meskipun demikian KUBE Gulurejo dihadapkan dengan permasalahan di antaranya produksi yang masih terbatas volume dan variasinya, modal usaha yang masih minim jumlahnya, belum memiliki jaringan kerja yang luas, belum

tersentuh lembaga keuangan, minimnya kegiatan peningkatan kapasitas anggota, belum optimalnya sinergi antar PD untuk mengembangkan KUBE.

Selain itu, Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo sebagai pengampu program juga menghadapi kendala tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan program KUBE seperti melakukan pembinaan kepada anggota KUBE sebagai penerima bantuan, bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas, maupun anggaran untuk melaksanakan monitoring-evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Pemda Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Penanggulangan Kemiskinan dalam Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE.

Penelitian tentang KUBE sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu:

1. Laras Aprilianti dan Eka Zuni Lusi Astuti, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada tahun 2019, yang berjudul, ”Menakar Keberlanjutan Program KUBE: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.”

Jenis Penelitian yang dipergunakan deskriptif kualitatif dengan informan meliputi pengurus dan anggota KUBE (enam KUBE), pendamping KUBE, dan Penanggung Jawab KUBE dari Dinas Sosial Kotamadya Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan subyek penelitian menggunakan

purposive sample dengan teknik analisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Faktor internal kelompok sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau keberlanjutan KUBE di Kelurahan Keparakan tersebut. Semua KUBE yang diteliti (6 KUBE) mengalami permasalahan yang sama yakni hambatan berusaha dan adanya anggota-anggota kelompok yang tidak dapat menjalankan kesepakatan kelompok. Akan tetapi, KUBE yang berhasil atau berlanjut (4 KUBE) dapat menyelesaikan permasalahan, sementara 2 KUBE lainnya mati karena gagal dalam mengatasi permasalahan kelompok.

b. Faktor pendamping atau Dinas Sosial atau lembaga masyarakat memegang peranan penting akan keberlanjutan KUBE. Pendamping tidak memiliki pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. Dalam hal ini, Dinas Sosial kurang berperan mendampingi atau membimbing kelompok untuk mengembangkan usaha. Dinas Sosial pernah memberikan fasilitasi pelatihan kepada KUBE, namun pelatihan tidak dilaksanakan secara intensif, sehingga pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, peran lembaga masyarakat tidak optimal untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program KUBE. (*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20 Nomor 1 April 2019)

2. Isti'ana Yuliartati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE di Jawa Tengah.

Jenis penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik pemilihan responden secara *purposive*. Informan terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, TKSK, pendamping KUBE PKH, dan ketua KUBE. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:

Pertama, tahapan penyadaran melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD),

Kedua, tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan,

Ketiga, pelaksanaan dilakukan dengan pelatihan-pelatihan,

Keempat: tahap pengembangan KUBE melalui media *online* dan pameran-pameran hasil produksi KUBE,

Kelima: tahap evaluasi dengan melihat dan mengukur seberapa berhasil program yang dijalankan.

b. bahwa hasil pemberdayaan masyarakat melalui KUBE adalah a) terpenuhinya kebutuhan anggota KUBE, b) peningkatan pendapatan anggota KUBE, c) partisipasi anggota KUBE. (*Jurnal Masyarakat Madani* Volume 4 No 2 Tahun 2019).

3. Ibrahim Imron dkk, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, 2014 dengan judul: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE, Studi Kasus pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan 4 tahapan yakni tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan (verifikasi).

Hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

a. bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Dawuhan diawali dengan pembentukan kelompok, melalui 3 tahapan yaitu : 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap penyerahan bantuan. Semua tahapan didominasi oleh pemerintah (Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Propinsi dan Dinas Sosial Kabupaten). Program Pemberdayaan Fakir Miskin ini mengalami kegagalan, dari 30 KUBE (bergerak di bidang peternakan sapi) yang ditumbuhkan hanya 10 KUBE yang memenuhi indikator keberhasilan, dan mendapatkan bantuan pengembangan.

Ketiga tahapan proses pemberdayaan tersebut semuanya berasal dari pemerintah. Pemerintah memberikan stimulus masyarakat Desa Dawuhan agar mampu mengembangkan kapasitasnya melalui KUBE. Sasaran jangka pendek dari pemberdayaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan sasaran jangka panjang adalah peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat sasaran pemberdayaan dalam usaha dan kelembagaannya.

b. bahwa pengembangan kapasitas dan pengembangan KUBE menggunakan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5 P yaitu: 1) Pemungkinan, 2) Penguatan, 3) Perlindungan, 4) Penyokongan, 5) Pemeliharaan. Pendekatan pemberdayaan melalui model tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten yang bertindak selaku penyokong, pelindung, dan pemelihara. Sementara pendekatan pemungkinan dan penguatan diserahkan kepada pendamping lapangan. Langkah-langkah yang diambil pendamping dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok, serta penataan administrasi keuangan.

c. bahwa usaha peternakan sapi oleh KUBE di Dawuhan dilakukan secara sambilan. Sistem usaha secara sambilan yang bercirikan skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usaha bersifat pembibitan dan pembesaran.

d. bahwa terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika KUBE di Desa Dawuhan yaitu permasalahan internal kesadaran minoritas anggota kelompok yang masih belum mampu untuk memahami dan menjalankan tujuan kelompok, adanya dualisme pekerjaan pendamping lapangan, kebudayaan dan lingkungan Desa Dawuhan yang kurang mendukung perkembangan ekonomi kelompok, serta pihak pemerintah yang kurang dalam intensitas pengawasan di lapangan. (*Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2 No. 3 tahun 2014).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu (penelitian oleh Laras Aprilianti, Istiana, dan Ibrahim) yakni sama-sama meneliti tentang

pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dengan metode penelitian secara kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE dengan fokus pada tahapan-tahapan dan kendala-kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada faktor penyebab kegagalan, peluang dan tantangan serta hasil-hasil pemberdayaan KUBE.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo melalui tahap-tahap:
   a. Tahap Penyadaran
   b. Tahap Pengembangan Kapasitas
   c. Tahap Perlindungan
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat Praktis

   Memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah, serta pihak-pihak terkait tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE.

2. Manfaat Akademis

   Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang upaya pemerintah daerah memberdayakan masyarakat miskin.

F. Kerangka Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa

(*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki (Anwas, 2019:48).

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, baik itu kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalilkan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat untuk memikirkan dan memutuskan serta melakukan sesuatu yang tepat, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Suharto, 2017: 62).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas–tugas kehidupannya (Suharto, 2017: 62).

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik (Anwas, 2019:51).

Fokus pemberdayaan masyarakat dapat bersifat individu dan juga komunitas. Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya. Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri (Anwas, 2019: 51).

Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri (Suharto, 2017: 59).

2. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian daya pada target pemberdayaan. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pokok gagasan adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan si penerima. Peran pemerintah bukan lagi sebagai penyedia (*provider*) tetapi sebagai fasilitator (*enabler*), karena ada pergeseran paradigma dari *top down* menuju *bottom up*. Peran pemerintah sebagai *enabler* berarti pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi

masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Soetomo, 2018:145).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2017: 58).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. KUBE yang dibentuk merupakan suatu kelompok usaha yang berasal dari keluarga tidak mampu (fakir miskin). Keluarga fakir miskin tersebut terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial RI. KUBE ditumbuhkan dan dikembangkan berdasarkan inisiatif anggota-anggota kelompok itu sendiri. Anggota-anggota KUBE saling berinteraksi satu sama lainnya. Mereka berdomisili di suatu wilayah yang sama.

KUBE didirikan untuk meningkatkan produktifitas para anggota kelompok, meningkatkan hubungan sosial yang harmonis, dapat memenuhi

kebutuhan para anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami serta menjadi tempat mengembangkan usaha kelompok. KUBE yang telah terbentuk kemudian diberikan penguatan kapasitas kelompok dan diberdayakan.

Menurut Anwas (2019), pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*). Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik (Anwas, 2019: 51). Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan tetapi suatu proses yang mempunyai beberapa tahapan yaitu: Penyadaran, Peningkatan Kapasitas, dan Perlindungan (Soetomo, 2019: 307, Wrihatnolo, 2016: 35).

a. Tahap Penyadaran

Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki daya tawar dan daya saing untuk hidup mandiri.

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya

dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktifitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktifitas pemberdayaan tersebut di antaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potesi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan–kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya (Anwas, 2019: 86).

Melalui pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang mudah dan bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Perubahan juga dimulai dari saat ini, tidak menunggu komando atau kesempatan tertentu (Soetomo, 2019: 79).

Penyadaran adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, yang dimulai dari diri mereka sendiri. Ada tahapan kognisi, *belief* dan *healing*. Mereka seharusnya percaya bahwa pemberdayaan akan menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyadaran adalah menanamkan keyakinan, misalnya target adalah kelompok miskin, bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, mereka harus merasa bisa melakukan, apabila

mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan, diupayakan pula agar masyarakat mendapat cukup informasi, melalui informasi aktual dan akurat supaya terjadi proses penyadaran secara alamiah (Wrihatnolo, 2016: 59).

b. Tahap Pengembangan Kapasitas

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam mendorong masyarakat miskin untuk secara kolektif untuk lebih terarah dalam proses pengambilan keputusan termasuk penanggulangan kemiskinan yang mereka alami. Keberdayaan masyarakat miskin ditandai dengan bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh masyarakat miskin secara kolektif yang pada akhirnya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan (asset) keluarga miskin. Semakin berdaya warga miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas warga miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunannya secara mandiri (Soetomo, 2019: 307).

Pengembangan kapasitas merupakan unsur yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kelompok dapat dikatakan berdaya apabila mereka memiliki kewenangan dan kapasitas dalam menentukan masa depannya. Suatu kelompok dalam berinteraksi dengan anggota-anggotanya memiliki kebutuhan yang sama, sehingga perlu melakukan tindakan yang terorganisasi. Lembaga Kelompok Usaha Bersama

dibutuhkan agar dapat menjadi media aktualisasi kewenangan termasuk dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan tindakan bersama (Anwas, 2019: 60).

Agar aktualisasi kewenangan tersebut efektif diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut. Institusi yang sudah meningkat kapasitasnya lebih memungkinkan menjadi sarana menuju kemandirian dan keberlanjutan. Kemandirian dan keberlanjutan merupakan indikator utama dari masyarakat yang semakin berdaya.

Pengembangan kapasitas (*capacity building)* adalah memampukan atau *enabling*. Untuk diberi daya dan kuasa mereka harus mampu terlebih dahulu, misalnya melalui kegiatan workshop, pelatihan, seminar, diskusi dan lain sebagainya. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis: organisasi, sistem nilai, dan manusia. Target individu atau manusia adalah meningkatkan kapasitas pada masing-masing individu, sehingga mampu menerima tugas, beban kerja, tanggung jawab secara proporsional. Namun tiap-tiap individu tidak akan sama karena karakteristik kepribadian yang berbeda (Wrihatnolo, 2016: 70).

Pengembangan kapasitas organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya, misalnya sebelumnya diberi peluang usaha bagi kelompok miskin dibuatkan Kelompok Usaha bersama (KUBE). Agar manajemennya efisien dan efektif, organisasi tersebut ditata supaya berpola *structur follow function.*

Pada organisasi yang lebih maju, sistem nilai terdiri dari budaya organisasi, etika, dan *good governance* (Soetomo, 2018: 342).

c. Tahap Perlindungan

Salah satu perwujudan fungsi pemerintah untuk menjamin setiap warga negaranya dapat hidup minimal memenuhi kebutuhan dasarnya adalah melalui pemberian jaminan sosial (Soetomo, 2018: 241).

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan bagi kehidupan seseorang terhadap kondisi yang tidak diharapkan bahkan yang seringkali tidak diperhitungkan. Jaminan sosial merupakan program perlindungan seseorang dari kondisi yang mengakibatkan terhentinya peluang untuk mendapatkan pendapatan, seperti karena sakit, hari tua, dan pemutusan hubungan kerja (Soetomo, 2018: 242).

Jaminan sosial memberikan perlindungan kepada seseorang sejak sebelum lahir sampai meninggal, terhadap kemungkinan mengalami kesulitan hidup, sehingga dalam kondisi kesulitan sosial ekonomi tetap dapat menjalani kehidupan sesuai harkat dan martabat manusia.

Kebijakan jaminan sosial perlu dikembangkan oleh karena orang tidak dapat memperhitungkan secara pasti akan kondisi masa depan. Di samping itu, kemampuan seseorang untuk menghadapi hari depan yang tidak menentu tersebut juga berbeda. Banyak kelompok masyarakat yang kondisi sosial ekonominya kurang menguntungkan, sehingga cukup rentan dalam menghadapi peristiwa dan kebutuhan yang harus dihadapi

apalagi jika sifatnya mendadak (Soetomo, 2018: 243). Dalam perkembangannya kemudian, jaminan sosial ini lingkupnya semakin meluas menyangkut kesejahteraan sejak sebelum lahir sampai meninggal, dan berlaku pada semua lapisan masyarakat yang kondisinya dinilai rentan (Soetomo, 2018: 244).

Jaminan sosial oleh pemerintah diprioritaskan kepada warga masyarakat yang hidupnya berada di bawah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi warga miskin jaminan sosial oleh pemerintah yang perlu mendapat perhatian adalah jaminan kesehatan dan pendidikan. Jaminan sosial yang berupa bantuan sosial langsung sebaiknya diberikan untuk kondisi yang bersifat darurat seperti bencana alam, atau kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar karena kondisi krisis. Dalam kondisi yang tidak bersifat darurat, pelayanan sosial yang diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah sebaiknya bukan bantuan langsung, melainkan bantuan yang bersifat pengembangan kapasitas (Soetomo, 2018: 245).

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 disebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 disebutkan bahwa Desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

Pemerintah desa dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1).

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan: a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, b) meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari masyarakat tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi: a) pelatihan, usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, b) pelatihan teknologi tepat guna, c) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, dan d) peningkatan kapasitas masyarakat antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki makna kesetaraan, adil, demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkunganya dalam meningkatkan kualitas kehidupan sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

4. Fungsi Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Terdapat beberapa fungsi dari Pemda dalam pemberdayaan masyarakat miskin sebagaimana tercantum pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di antaranya ialah:

Pertama, Fungsi Pendataan

Pemda Kabupaten Kulon Progo melakukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan. Pendataan penduduk dengan kategori kemiskinan tersebut dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditujuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan Dukuh setempat di bawah koordinasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait. Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran DTKS yang

ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Pendataan penduduk dan keluarga kategori kemiskinan dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.

Kedua, Memberikan Bantuan Sosial

Pemda memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dalam bentuk: 1) perlindungan sosial meliputi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asistensi sosial, asuransi kesejahteraan sosial, jaminan sosial sesuai jenis dan kriteria sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) pemberdayaan sosial melalui pengembangan potensi diri dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan meliputi: a) pelatihan keterampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan pelatihan, b) bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan, c) fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, d) fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan, e) fasilitasi usaha kelompok, f) fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan swasta.

Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri. Setiap penduduk dan keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal usaha. Pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan dan keberlanjutan usaha penduduk dan keluarga miskin.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha meliputi: a) peningkatan permodalan penduduk dan keluarga miskin, b) perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan, c) peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir.

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perda No 19 Tahun 2015

Untuk mencapai tujuan-tujuan Penanggulangan Kemiskinan Pemda Kulon Progo memerlukan strategi untuk mewujudkannya. Dalam Pasal 12 Perda Penanggulangan Kemiskinan disebutkan mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan melalui: a) Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor policy*), b) melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin (*against poor policy*). Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan: a) pelatihan keterampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, b) bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan, c) fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, d) fasilitasi pengorganisasian relawan penanggulangan kemiskinan, e) fasilitasi usaha kelompok, f) fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan Swasta.

Disebutkan bentuk dan program perlidungan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Bentuk dan program perlindungan sosial meliputi: a) bantuan pangan dan sandang, b) bantuan kesehatan, c) bantuan perumahan,

d) bantuan pendidikan, e) perlindungan dan rasa aman, dan f) pelayanan sosial.

Pemda memberikan bantuan sandang dan pangan. Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan bagi penduduk dan keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan sandang dan bahan pangan yang layak dikosumsi serta terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan keluarga miskin. Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan dilaksanakan melalui: a) pemberian subsidi pembelian bahan sandang dan pangan layak konsumsi. b) pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk dan keluarga miskin.

Pemda memberikan bantuan kesehatan. Mengenai hal tersebut, Pemda bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga miskin dalam bentuk ketersediaan pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif. Program bantuan kesehatan dilaksanakan melalui: a) pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, dan b) pembebasan pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif terintegrasi dengan Sistem Jaminan Kesehatan di Daerah.

Pemda memberikan bantuan perumahan. Program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga miskin berupa: a) penyediaan perumahan, b)

bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, c) bantuan sarana dan prasarana permukiman. Bantuan rumah tidak layak huni, bantuan sarana dan prasarana permukiman melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan.

Pemda memberikan bantuan pendidikan. Program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga miskin meliputi: a) pemberian jaminan pendidikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sekolah pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan b) pemberian akses pendidikan di sekolah negeri.

Pemda memberikan pelayanan sosial. Pemda bertanggung jawab menyelenggarakan pelayaan sosial bagi penduduk dan keluarga miskin. Pelayanan sosial meliputi: a) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup, b) meningkatkan kemampuan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan.

Dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan-bantuan sosial tersebut, Pemda mengangkat sumberdaya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang dinamakan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Pada setiap desa diangkat KPKD yang bertugas melaksanakan pendampingan terhadap penduduk dan keluarga miskin. Tugas pendampingan KPKD berupa: a) menginformasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di daerah,

b) melaksanakan penilaian asesmen dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi penduduk dan keluarga miskin, c) melaksankan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan penaggulangan kemiskinan, d) melaksanakan tugas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan penaggulangan kemiskinan. Jumlah kader pada setiap desa proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas desa yang bersangkutan. Pengangkatan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanggulangan kemiskinan (Dinas Sosial).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2019:6) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami

suatu keadaan secara apa adanya mengenai suatu gejala, maupun fenomena tertentu.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan obyek penelitian secara utuh dan obyektif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang diteliti, adalah: *Pertama*, pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, kendala-kendala yang dialami dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE tersebut.

4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Beberapa pihak yang menjadi subyek/informan guna pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 1 orang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, 1 orang Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, 1 Koordinator Daerah (Korda) Program BPNT/Sembako Kabupaten Kulon Progo, 1 orang Pendamping KUBE Kalurahan Gulurejo, 1 aparatur pemerintah Kalurahan Gulurejo, 2 orang Ketua KUBE, dan 2 orang anggota KUBE. Penentuan informan tersebut dilakukan dengan teknik *purposive,* dengan cara

menentukan pemilihan sumber data dengan memilih orang-orang yang diwawancarai dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu, karena informan-informan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, dan mengetahui secara pasti tentang detail obyek penelitian.

Tabel I. 2

Identitas Informan

No	Nama Informan	L/P	Usia	Pend	Jabatan/Pekerjaan
1	Drs. Abdul Kahar, M.Si	L	54	S2	Kabid Dayasos
2	Ika Dwi WK, S.IP	P	40	S1	Kasi PFM
3	Ferniati, S.Sos	P	30	S1	Korda BPNT/Sembako
4	Sarjidi	L	58	SMA	Lurah Gulurejo
5	Triyuni Lestari, A.Md	P	35	D3	Pendamping KUBE
6	Suminten	P	50	SMA	Ketua KUBE Mendiro
7	Ngatini	P	43	SMA	Ketua KUBE Sumurmuling
8	Ratri	P	40	SMA	Anggota KUBE Mendiro
9	Sulastri	P	37	SMA	Anggota KUBE Sumurmuling

Sumber: Data Primer Dinas Sosial, Kalurahan dan KUBE Gulurejo

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mengetahui berbagai peristiwa atau fenomena terkait pemberdayaan masyarakat.

b. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam situasi formal, dan dilakukan berulang–ulang kepada

informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi bisa dikumpulkan secara mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen berupa studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berisi peraturan-peraturan, pendapat-pendapat maupun teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisa interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan berikut ini:

a. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungklin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion*)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemuinya. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN GULUREJO

A. Sejarah Berdirinya Kalurahan Gulurejo

Kalurahan Gulurejo terletak di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut sejarah, asal usul Kalurahan Gulurejo tidak lepas dari cerita tentang tokoh-tokoh masyarakat sebagai orang yang mula-mula datang dan mendiami kalurahan tersebut (Sumber:http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/sejarah-kalurahan.Diunduh pada tanggal 7 Juni 2021). Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang pertama kali membuka lahan, kemudian menjadi cikal bakal Kalurahan Gulurejo. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kyai Klipo Joyo di Klipuh
2. Kyai Jogo Gumbolo di Bonorejo
3. Kyai Dongpakoro dan Nyai Dongpangerti (Kyai Gambiranom dan Nyai Gambiranom) di Sumurmuling
4. Kyai Mondoroko dan Nyai Mondoroko di Gegulu
5. Kyai Sembung Joyo di Sembungan
6. Kyai Nur Salim di Wonolopo
7. Nyai Manten di Mendiro
8. Kyai Kertosari dan Nyai Kertosari di Pulo
9. Kyai Sodipo dan Nyai Sodipo di Pengkol

Sejarah awal mula berdirinya Kalurahan Gulurejo dimulai pada tahun 1926 sampai 1945. Berdirinya Kalurahan Gulurejo merupakan penggabungan dari kalurahan-kalurahan, yang terdiri dari beberapa pedusunan. Mula-mula berdiri Kalurahan Mendiro, lurah pertama menjabat bernama Kartodinoyo. Setelah *lengser keprabon*, jabatan lurah diganti oleh lurah kedua yang bernama Kartosenjoyo. Kalurahan ini meliputi wilayah: Pedukuhan Wonolopo, Pedukuhan Mendiro, Pedukuhan Pulo, Pedukuhan Pengkol.

Setelah itu, berdiri Kalurahan Gegulu. Menjabat sebagai lurah pertama bernama Marjuki. Lurah kedua bernama Ronopawiro. Lurah ketiga bernama Poncodimejo. Kalurahan Gegulu meliputi wilayah: Pedukuhan Sembungan dan Pedukuhan Gegulu.

Pada tahun 1940 terjadi penggabungan Kalurahan Mendiro dengan Kalurahan Gegulu menjadi Kalurahan Gegulu dengan lurah bernama Poncodimejo, dengan wilayah kalurahan meliputi: Pedukuhan Sembungan, Pedukuhan Gegulu, Pedukuhan Wonolopo, Pedukuhan Mendiro, Pedukuhan Pulo, Pedukuhan Pengkol.

Selanjutnya, berdiri Kalurahan Bonorejo pada tahun 1940-an, lurah pertama menjabat bernama Surowijoyo. Lurah kedua bernama Joyosudarmo. Kalurahan Bonorejo meliputi wilayah: Pedusunan Klipuh, Pedusunan Bonorejo, Pedusunan Kragilan, dan Pedusunan Sumurmuling.

Sejarah masa Pemerintahan Kalurahan penggabungan pada tahun 1946 - 1961. Pada waktu itu tahun 1950 bersamaan pula terjadi penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta menjadi satu Kabupaten Kulon Progo. Penggabungan Kalurahan tersebut bercirikan:

Pertama, Sistem Pemerintahan Otonom

Kedua, Proses kepemimpinan Pemerintahan Kalurahan dengan cara pemilihan. Pemilih yang mempunyai hak pilih adalah Kuli Kenceng, bisa disebut kuli sewu. Pemilihan dilakukan dengan cara pemilihan acungan, yakni mengacungkan jari telunjuk untuk memilih calon lurah dimaksud. Kantor Kalurahan berada di rumah Lurah. Lurah mempunyai pendopo joglo yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan.

Ketiga, Berdasarkan hasil pemilihan secara acungan dari para kuli sewu tersebut terpilih Surokartono sebagai Lurah Gulurejo. Tempat Pemerintahan di Balai Ringin Gulurejo mewilayahi 10 Pedukuhan, yaitu: Pedukuhan Klipuh, Bonorejo, Kragilan, Sumurmuling, Gegulu, Sembungan, Wonolopo, Mendiro, Pulo, dan Pengkol.

Setelah adanya penggabungan dua Kalurahan ini (Bonorejo dan Gegulu) maka nama Kalurahan menjadi Gulurejo,dipimpin oleh Lurah Surokartono. (Sumber: http://gulurejokulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/sejarah.Diunduhpada tanggal 12 Juni 2021).

Adapun Kepemimpinan Lurah Surokartono memiliki Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan sebagai berikut:

1. Lurah : Surokartono
2. Carik : Mangun Disastro (WS Sumantri)
3. Bagian Keamanan : Kartopawiro

4. Bagian Kemakmuran : Mulyowiharjo
5. Bagian Agama : Wiryosumarto (Joyosumarto)
6. Bagian Sosial : Harjosumarto
7. Dukuh Klipuh : Joyowiyono
8. Dukuh Bonorejo : Suroatmojo
9. Dukuh Kragilan : Surosujono
10. Dukuh Sumurmuling : Kariyodikrono
11. Dukuh Gegulu : Puspodiharjo
12. Dukuh Sembungan : Irodikromo (Harjodoriyo)
13. Dukuh Wonolopo : Darmosumarto (Mardiwiyono)
14. Dukuh Mendiro : Mitroharjono (Kromorejo)
15. Dukuh Pulo : Hadisumarto
16. Dukuh Pengkol : Arjosemito

Semenjak jaman pra kemerdekaan, kemerdekaan, Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga sekarang ini, Pemerintahan Kalurahan Gulurejo dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa, sebagai berikut:

Lurah Surokartono Periode Tahun 1941- 1946

Lurah S. Darmosumarto Tahun 1947 - 1995

Kepala Desa Muh Mardi Periode Tahun 1996 - 2004 (Periode I)

Kepala Desa Muh Mardi Tahun 2005-2014 (Periode II)

Lurah Sarjidi mulai tahun 2016-2021 sebagai lurah terpilih yang menjabat saat ini.

B. Keadaan Geografis

1. Batas Wilayah

Kalurahan Gulurejo berada di wilayah Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut batas-batas wilayah Kalurahan Gulurejo.

Tabel II.1

Batas Wilayah

Batas	Kalurahan	Kapanewon
Sebelah Utara	Ngentakrejo	Lendah
Sebelah Selatan	Sidorejo	Lendah
Sebelah Timur	Sungai Progo	Lendah
Sebelah Barat	Srikayangan	Lendah

Sumber:http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/profil-wilayah-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Berdasarkan tabel II.1 Kalurahan Gulurejo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan kalurahan Ngentakrejo, sebelah selatan berbatasan dengan kalurahan Sidorejo, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Progo dan sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Srikayangan. Ketiga kalurahan dan Sungai Progo tersebut masuk dalam wilayah di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Geografi Kalurahan Gulurejo yang berbatasan dengan Sungai Progo dan Kalurahan-kalurahan di sekitarnya, memiliki arti yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Sungai Progo merupakan potensi alam yang berfungsi sebagai ”sumber” bagi pemberdayaan masyarakat. Sungai Progo mengaliri areal persawahan di Gulurejo, membuat tanah menjadi subur, sehingga dapat memakmurkan masyarakatnya,

gemah ripah loh jinawi. Berbatasan dengan kalurahan–kalurahan di sekitarnya, bagi masyarakat/KUBE Gulurejo merupakan suatu keuntungan. Masyarakat/KUBE Gulurejo dapat berinteraksi dengan masyarakat di kalurahan-kalurahan sekitarnya. Adanya interaksi ini, masyarakat Kalurahan Gulurejo/KUBE bisa memperoleh barang atau jasa atau menjualnya kepada masyarakat di kalurahan-kalurahan sekelilingnya. Adanya interaksi timbal balik itu mampu menggerakkan perekonomian bagi masyarakat/KUBE Gulurejo dan sekitarnya.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Gulurejo dapat ditinjau dari penggunaan wilayahnya yakni sebagai berikut:

Tabel II.2

Luas Wilayah

No	Jenis Lahan	Luas (ha)
1.	Tanah Pemukiman	29,2320
2.	Tanah Sawah	93,707
3.	Tanah Ladang/Tegalan	7
3.	Hutan	-
4.	Rawa-rawa	-
5.	Perkantoran	0,2428
6.	Jalan	40,2825

Sumber:http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/batas-wilayah-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Berdasarkan tabel II.2 di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah Kalurahan Gulurejo berdasarkan penggunaan lahan tanah, peruntukannya sebagai lahan persawahan yakni seluas 93,707 ha. Luas lahan untuk jalan seluas 40,2825 ha,

sedangkan lahan untuk pemukiman luasnya mencapai 29,2320 ha. Adapun tanah untuk ladang/tegalan dan perkantoran masing masing seluas 7 ha dan 0,2428 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Gulurejo memiliki potensi bagi pemberdayaan masyarakat dengan tersedianya lahan dan fasilitas jalan.

3. Keadaan Iklim

Kalurahan Gulurejo terletak di ketinggian 200-300 m di atas permukaan laut (dpl). Letak Kalurahan berada di pinggir Sungai Progo dengan hamparan persawahan dengan suhu rata-rata harian sebesar 30 derajat celcius. Sedangkan jumlah bulan hujannya yaitu 7 bulan dengan curah hujan 100,00 Mm/thn.

4. Orbitasi

Orbitasi Kalurahan Gulurejo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.3

Orbitasi

No	Jarak/Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak Kalurahan ke ibu kota kapanewon	4 km
2.	Lama jarak kalurahan ke ibukota kapanewon dengan kendaraan bermotor	10 menit
3.	Jarak kalurahan ke ibukota kabupaten	15 km
4.	Lama jarak kalurahan ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor	25 menit
5.	Jarak kalurahan ke ibukota provinsi	25 km
6.	Lama jarak kalurahan ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor	1 jam

Sumber:http://gulurejokulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/orbitasi-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Dalam proses pemberdayaan, lama waktu tempuh dan jarak tempuh dari pusat pemberdayaan (Kalurahan Gulurejo) ke ibukota kapanewon dan ibukota

kabupaten maupun ibukota provinsi sangat berpengaruh. Semakin dekat jarak dari pusat pemberdayaan ke ibukota kapanewon, kabupaten maupun provinsi tentu semakin baik. Begitu pun lama jarak tempuhnya, semakin cepat maka semakin baik. Tabel II.3 menjelaskan jarak tempuh kendaraan bermotor dari Kalurahan Gulurejo ke kapanewon, kabupaten hingga ke provinsi. Jarak antara Kalurahan Gulurejo sejauh 4 km dengan menggunakan moda kendaraan bermotor dapat ditempuh selama 10 menit. Sedangkan untuk mencapai kabupaten dengan jarak 15 km dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 25 menit. Adapun untuk mencapai ibukota propinsi dari Kalurahan Gulurejo, dengan jarak 25 km dapat ditempuh selam 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

C. Monografi Kalurahan

1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jumlah penduduk Kalurahan Gulurejo ialah sebagai berikut:

Tabel II.4

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki – laki	3.783 jiwa	49.86
2.	Perempuan	3.805 jiwa	50.14
Jumlah		7.588 jiwa	100

Sumber:https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Data penduduk Kalurahan Gulurejo dari Tabel II.4 di atas menunjukkan bahwa total jumlah penduduk sebanyak 7.588 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 3.783 jiwa (49,86%) dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 3.805 jiwa (50,14%). Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Gulurejo lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dalam proses pemberdayaan masyarakat akan memiliki pengaruh positif, yakni peluang untuk partisipasi kedua belah pihak sangat terbuka. Keberadaan kaum perempuan dan laki-laki yang seimbang tersebut berpeluang bagi keduanya untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan.

2. Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Adapun penduduk berdasarkan status perkawinan sebagai berikut:

Tabel II.5

Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	L (orang)	P (orang)	L+P (orang)	%
1.	Belum Menikah	1.605	1.333	2.938	38.72
2.	Menikah	2.015	2.020	4.035	53.18
3.	Cerai Hidup	50	59	109	1.44
4.	Cerai Mati	113	393	506	6.67
	Jumlah	3.783	3.805	7.588	100

Sumberhttps://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/statusperkawinan/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Data penduduk Kalurahan Gulurejo berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa paling banyak jumlah penduduk dengan status perkawinan menikah, yaitu 4.035 orang (53.18%), belum menikah 2.938 orang (38.72%), cerai mati 506 (6.67%), dan cerai hidup 109 (1.44%). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Gulurejo masih membutuhkan pemberdayaan karena masyarakat dengan keempat status perkawinan tersebut dapat dijadikan *entry poin* pemberdayaan masyarakat.

3. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Adapun pendudukan berdasarkan pendidikan di Kalurahan Gulurejo ialah sebagai berikut:

Tabel II.6

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L (orang)	P (orang)	L+P (orang)	%
1.	Tidak Sekolah	766	883	1.649	21,7
2.	Belum Tamat SD/MI	423	393	816	10,75
3.	Tamat SD/MI	1.130	1.129	2.259	29,77
4.	SMP/MTs	687	620	1307	17,22
5.	SMA/SMK/MA	656	633	1.289	16,99
6.	Diploma I/II	8	16	24	0,32
7.	Akademi/Diploma III/Sarmud	24	36	60	0,79
8.	Diploma IV/Strata I	88	93	181	2,39
9.	Strata II	1	2	3	0,04
	Jumlah	3.783	3.805	7.588	100

Sumberhttps://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pendidikan/13/0/05/01/34.ez . Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Berdasarkan data tabel II.6 dapat diketahui distribusi penduduk Kalurahan Gulurejo berdasarkan Tingkat Pendidikan, yakni tidak sekolah sebanyak 1.649 orang (21,7%), belum tamat SD/MI 816 orang (10,75%), tamat SD/MI 2.259 (29,77%), orang, SMP/MTs 1.307 orang (17.22%), SMA/SMK/MA 1.289 orang (16.99%), Diploma I/II 24 orang (0,32%), Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 60 orang (0,79%), Diploma IV/Strata I 181 orang (2,39%) dan Strata II 3 orang (0,045%).

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar penduduk Kalurahan Gulurejo belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Jika jumlah penduduk tidak sekolah, Belum Tamat SD/MI, Tamat SD/MI, dan SMP/MTs dijumlahkan akan diperoleh angka sebesar 6.031 orang (79.44%).

Adapun selebihnya 1.557 orang (20.56%) merupakan pendudukan yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA, Diploma, sampai Strata II. Data tersebut mengisyaraktkan bahwa untuk melakukan pembangunan sosial melalui pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Gulurejo masih sangat terbuka lebar.

4. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah pemeluk agama-agama di Kalurahan Gulurejo ialah sebagai berikut :

Tabel II.7

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	L	P	L+P	%
1.	Islam	3.774	3.787	7.561	99.64
2.	Katholik	6	9	15	0.20
3.	Kristen	3	9	12	0.16
Total		3.783	3.805	7.588	100

Sumberhttps://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/agama/13/0/05/01/3.ez.Diuduh pada tanggal 12 Juni 2021

Berdasarkan tabel II.7 dapat diperoleh informasi bahwa distribusi penduduk berdasarkan agama, agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk Kalurahan Gulurejo yakni 7.561 orang (99.64%) diikuti oleh Katholik 15 orang (0.20%) dan Kristen 8 orang (0.16%). Ketiga agama ini menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Gulurejo. Hubungan antara pemeluk agama dengan pemberdayaan masyarakat adalah berkaitan dengan etos kerja, semangat berprestasi (*need for achievement)* atau spirit untuk meraih hidup berkemajuan berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut, yakni untuk meraih kehidupan yang lebih baik, bahagia sejahtera.

5. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Adapun jenis pekerjaan warga masyarakat Kalurahan Gulurejo ialah sebagai berikut:

Tabel II.8

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	L	P	L+P
	Bukan angkatan Kerja			
1.	Mengurus Rumah Tangga	0	141	141
2.	Pelajar/Mahasiswa	404	392	796
3.	Pensiunan	20	7	27
	Angkatan Kerja			
4.	Belum Bekerja	61	61	122
5.	ASN	33	24	57
6.	TNI	6	0	6
7.	Polri	3	0	3
8.	Pejabat Negara	0	0	0
9.	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	273	229	502
10.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	715	881	1.596
11.	Karyawan BUMN/BUMD	1	2	3
12.	Karyawan Swasta	196	198	394
13.	Wiraswasta	1.196	1.118	2.314
14.	Tenaga Medis	0	3	3
15.	Tenaga Lainnya	19	3	22
Total		2.927	3.059	5.986

Sumberhttps://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/13/0/05/01/34.ez . Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

Berdasarkan data dari tabel II.8 dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan masyarakat Kalurahan Gulurejo sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 2.314 orang, disusul sektor petani/perkebunan/perikanan sebanyak 1.596 orang, pelajar/mahasiswa 796 orang, Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus 502 orang, karyawan swasta sebanyak 394 orang, buruh harian lepas 188 orang, mengurus rumah tangga 141 orang, belum/tidak bekerja 122 orang, Pegawai Negeri Sipil

(PNS) 57 orang, Pensiunan 27 orang, TNI 6 orang, Polri 3 orang, tenaga medis 3 orang, karyawan BUMN/BUMD 3 orang.

Pekerjaan mempengaruhi tingkat pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat sebagian penduduk Kalurahan Gulurejo bekerja dengan penghasilan rendah dan belum sejahtera, misalnya penduduk dengan pekerjaan sebagai buruh, buruh harian lepas, bahkan terdapat penduduk belum bekerja atau pengangguran. Penduduk dengan kriteria tersebut sangat berpotensi hidup dalam kemiskinan, sehingga dapat dibuatkan lembaga berupa kelompok (KUBE) untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat masih sangat diperlukan bagi masyarakat Kalurahan Gulurejo.

6. Data Penduduk Menurut Status Kesejahteraan

Berikut data penduduk Gulurejo menurut status kesejahteraan sosial:

Tabel II.9

Data Penduduk Menurut Status Kesejahteran Sosial

No	Status Kesejahteraan	RT	ART
1.	Sangat Miskin	42	240
2.	Miskin	143	690
3.	Hampir Miskin	244	970
4.	Rentan Miskin	391	1259
5.	Menuju *Middle Class*	333	848

Sumber: DTKS Kabupaten Kulon Progo tahun 2020, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI

Menurut data tersebut di atas penduduk Kalurahan Gulurejo memiliki status kesejahteraan dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan menuju *middle class.* Jumlahnya sebanyak 42 Rumah Tangga (RT)

dan 240 Anggota Rumah Tangga (ART) merupakan penduduk sangat miskin, sebanyak 143 RT dan 690 ART merupakan penduduk miskin, sebanyak 244 RT dan 970 ART merupakan penduduk dengan kriteria hampir miskin, sedangkan sebanyak 244 RT dan 970 ART merupakan penduduk dengan kriteria rentan miskin, dan selebihnya 333 RT dan 848 ART merupakan penduduk dalam kategori menuju *middle class*. Status penduduk Kalurahan Gulurejo dengan status kesejahteraan no 1 sampai 4 merupakan penduduk miskin, jumlahnya jika ditotal mencapai 820 RT dan 3.159 ART. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kalurahan Gulurejo.

D. Struktur Pemerintahan Kalurahan Gulurejo

1. Struktur Badan Permusyawaratn Kalurahan (BPK)

Badan Permusyawaran Kalurahan (BPK) memegang peranan sangat penting bagi pembangunan kalurahan. Keberadaan BPK Gulurejo sangat penting dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengimbangi (*check anda balance*) perangkat kalurahan. Keberadaan BPK Gulurejo sangat dibutuhkan dalam setiap pembahasan musyawarah kalurahan (muskal). Bersama Lurah Kalurahan Gulurejo, BPK membahas tentang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), laporan pertanggungjawaban lurah, maupun pembahasan isu-isu strategis tentang kemiskinan, data calon penerima manfaat bantuan sosial (KIS, Bedah Rumah, BPNT) termasuk juga bansos KUBE.

Berikut ini Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gulurejo:

Gambar II.1

Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gulurejo Periode Tahun 2020 – 2026

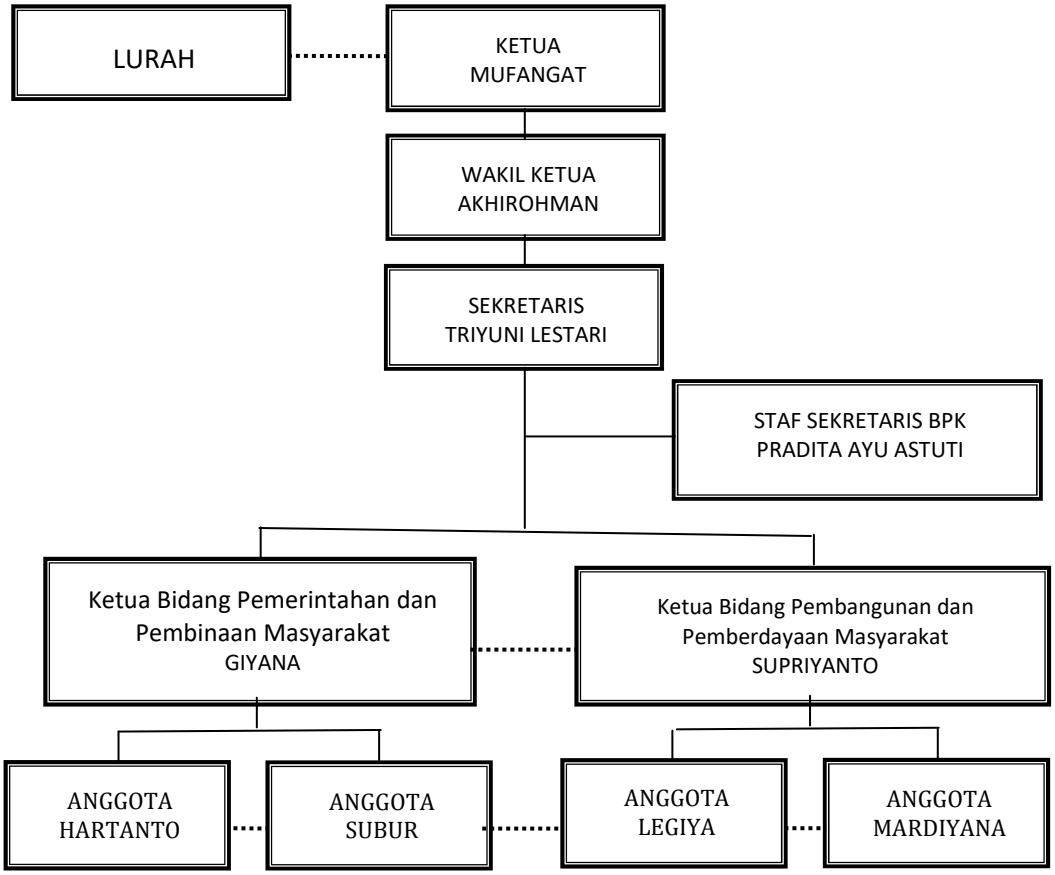

Sumberhttps://datastudio.google.com/reporting/db05024c-7241-4abc-b26b-0cd7ff3e7b13/page/lev7B. Diunduhpada tanggal 12 Juni 2021

Keterangan :

---------- : Garis Koordinasi

———— : Garis Komando

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Gulurejo

Berikut ini Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Gulurejo :

Tabel II.10

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Gulurejo

No	Nama	Jabatan
1.	Sarjidi	Lurah
2.	Wahyu Widayat, ST	Carik
3.	Sumarah	Panata Laksana Sarta Pangripta
4.	Nazamuddin Arif	Danarta
5.	Joko Endarto	Jagabaya
6.	Supardal	Ulu-ulu
7.	Didik Fianta, S.Pt	Kamituwa
8.	Suyatno	Staf Kalurahan
9.	Arif Suseno	Staf Kalurahan (THL)
10.	Arif Wibowo	Staf Kalurahan (THL)
11.	Widada	Dukuh Klipuh
12.	Teguh	Dukuh Banarejo
13.	Dwi Susilo	Dukuh Kragilan
14.	Sugiyem	Dukuh Sumurmuling
15.	Panggih	Dukuh Gegulu
16.	Bardi	Dukuh Sembungan
17.	Sukiyani	Dukuh Wonolopo
18.	Nanang Kustyanto	Dukuh Mendiro
19.	Sulisantoro	Dukuh Pulo
20.	Ngadino	Dukuh Pengkol

Sumber : http://siapdes.kulonprogokab.go.id. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2021

Tabel di atas adalah Struktur Pemerintah Kaluhan Gulurejo Periode tahun 2016 sampai 2021. Jabatan lurah dipegang oleh Sarjidi, Carik oleh Wahyu Widayat, ST, Sumarah menjabat sebagai Panata Laksana Sarta Pangripta, Nazamuddin Arif menjabat sebagai Danarta, Joko Endarto menjabat sebagai Jagabaya, Supardal menjabat sebagai Ulu-ulu, Didik Fianta, S.Pt menjabat sebagai Kamituwa, dibantu 2 orang staf kalurahan, beserta 10 kapala pedukuhan.

Keberadaan Lurah beserta aparatur kalurahan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan Kalurahan Gulurejo. Lurah beserta BPK Gulurejo berperan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan di Kalurahan. Demikian halnya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat termasuk KUBE. Perencanaan dan penganggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Peran kepala-kepala pedukuhan dalam pemberdayaan masyarakat, di antaranya memberikan masukan-masukan daftar nama calon penerima manfaat di forum musyawarah kalurahan.

E. Profil KUBE Gulurejo

KUBE Gulurejo, Mendiro dan Sumurmuling, pertama kali ditumbuhkan pada tahun 2016 oleh Kementerian Sosial RI, kemudian mendapat bantuan pengembangan pada tahun 2019 oleh Dinas Sosial DIY. Menjadi KUBE E-Warong, dipilih oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018. KUBE Batik Mendiro menjadi Juara I Lomba KUBE Berprestasi tingkat DIY pada tahun 2018, dan mewakili DIY menjadi Finalis (5 besar) pada Lomba KUBE Berprestasi tingkat Nasional di Jakarta pada tahun 2018.

Struktur Organisasi KUBE Mendiro sebagai Ketua adalah Suminten, Sekretaris adalah Latri, Bendahara adalah Usrek, dengan anggota-anggota: Sartini, Sutartini, Sumarsih, Kasmi, Sayem, Murdiyem, dan Poniyem.

Tabel II. 11

Struktur Organisasi KUBE Mendiro

No	Jabatan	Nama	NIK	Alamat
1.	KETUA	SUMINTEN	3401055011730001	Mendiro
2.	SEKRETARIS	RATRI	3401054612690003	Mendiro
3.	BENDAHARA	USREK	3401055709680002	Mendiro
4.	ANGGOTA	SARTINI	3401057111262029	Mendiro
5.	ANGGOTA	SUTARTINI	3401056103690001	Mendiro
6.	ANGGOTA	SUMARSIH	3401056810850001	Mendiro
7.	ANGGOTA	KASMI	3401055208780016	Mendiro
8.	ANGGOTA	SAYEM	3401054809690001	Mendiro
9.	ANGGOTA	MURDIYEM	3401054609750001	Mendiro
10.	ANGGOTA	PONIYEM	3401057112750019	Mendiro

Sumber : Data Base KUBE Dinas Sosial PPPA Kab. Kulon Progo tahun 2021

Gambar II. 2

KUBE Gulurejo dalam Lomba Penilaian KUBE Berprestasi

Tingkat Nasional Tahun 2018 di Jakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel II. 12

Struktur Organisasi KUBE Sumurmuling

No	Jabatan	Nama	NIK	Alamat
1.	KETUA	NGATINI	3401055708740001	Sumurmuling
2.	SEKRETARIS	SANIYEM	3401057112600029	Sumurmuling
3.	BENDAHARA	SULASTRI	3401055104700001	Sumurmuling
4.	ANGGOTA	NGATINEM	3401056410650001	Sumurmuling
5.	ANGGOTA	JUMITRI	3401057112610008	Sumurmuling
6.	ANGGOTA	GIYATI	3401055010740002	Sumurmuling
7.	ANGGOTA	SUWARNI	3401054405820001	Sumurmuling
8.	ANGGOTA	MISKIYEM	3401056106400001	Sumurmuling
9.	ANGGOTA	H. SETIYAWATI	3401054608920002	Sumurmuling
10.	ANGGOTA	NURKAYATRI	3401054507690002	Sumurmuling

Sumber : Data Base KUBE Dinas Sosial PPPA Kab. Kulon Progo tahun 2021

Adapun Struktur Organisasi KUBE Sumurmuling, sebagai Ketua adalah Ngatini, sekretaris ialah Saniyem, bendahara adalah Sulastri, dengan anggota-anggota: Jumitri, Giyati, Suwarni, Miskiyem, H.Setiyawati, dan Nurkayatri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Acemoglu, Daron dan James A Robinson, 2020, *Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan,* Jakarta: Elex Media Komputindo

Anwas, Oos M, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabet.

Moloeng, Lexy J., 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda

Petunjuk Teknis KUBE, Kemensos RI, 2020

Petunjuk Teknis Program BPNT/Sembako tahun 2021

Soetomo, 2018, *Masalah Sosial Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----------, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat: Adakah Anti Tesisnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2014, *Analisis Kebijakan Publik,* Bandung: Alfabeta.

----------, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,* Bandung: Refika Aditama.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2016, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal:

Aprilianti, Laras, da Eka Zuni LusiAstuti, Menakar Kelanjutan Program KUBE: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20 Nomor 1 April 2019.

Ibrahim Imron dkk, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama, Studi Kasus pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2 No. 3 tahun 2014.

Yuliartati, Isti'ana, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama di Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Madani* Volume 4 No 2 Tahun 2019.

Sumber Internet:

Antara News.com, Angka Kemiskinan di Kulon Progo naik 0,62 persen akibat Covid-19. Diunduh tanggal 15 Januari 2021

www.bps.go.id, Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020.

https://bps.go.id, Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2019-2020. Diunduh tanggal 16 Maret 2021

Dtks.kemensos.go.id, DTKS Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Diunduh tanggal 15 Januari 2021

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10495, Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Batu Bata untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah). Diunduh pada tanggal 16 Maret 2021.

http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/sejarah-kalurahan. Diunduh pada tanggal 7 Juni 2021

http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/sejarah-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/profil-wilayah-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

http://gulurejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/orbitasi-kalurahan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/statusperkawinan/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pendidikan/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/agama/13/0/05/01/3.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/13/0/05/01/34.ez. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

https://datastudio.google.com/reporting/db05024c-7241-4abc-b26b-0cd7ff3e7b13/page/lev7B. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021

http://siapdes.kulonprogokab.go.id. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2021

http://kulonprogokab.go.id, Lima Perwakilan KUBE Gulurejo Terima Penguatan Modal Guna Kembangkan Usaha Produktif di Masa Pandemi. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2021.

https://visitingjogja. com/8602/desa-wisata-sembungan. Diunduh pada tanggal 7 Juni 2021

http://kulonprogokab.go.id, Lima Perwakilan KUBE Gulurejo Terima Penguatan Modal Guna Kembangkan Usaha Produktif di Masa Pandemi. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2021.

Sumber Data:

Data E-Warong di Kabupaten Kulon Progo

Data Base KUBE Kabupaten Kulon Progo

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Desa Gulurejo tahun 2019

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin

SK Mensos Nomor 146/HUK/2020 tentang Status Kesejahteran DTKS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/Per/HK 02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran BPNT

SK Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Nomor 460/2622 tanggal 9 Mei 2018 tentang Nama E-Warong Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)